

BAB V

KESIMPULAN

Jepang merupakan sebuah negara yang memiliki dua persepsi berbeda tentang dirinya sebelum dan sesudah Perang Dunia II. Sebelumnya Jepang beranggapan bahwa negara yang kuat adalah negara yang memiliki kekuatan militer yang besar, yang dikenal dengan *fukoku kyohei*. Akan tetapi setelah kekalahannya pada Perang Dunia II persepsi negara yang kuat berubah menjadi negara yang memiliki kapasitas ekonomi yang stabil, yang disebut dengan *fukoku kenzei*. Perekonomian tersebut kemudian direalisasikan dengan cara membuka diri dengan negara lain melalui perdagangan bebas. Diawali dengan ancaman oleh Comodor Perry tahun 1853, Jepang mulai membuka dirinya terhadap perdagangan bebas yang menghapuskan hambatan tarif.

Kedua persepsi mengenai negara ekonomi dan sistem terbuka perdagangan bebas ini sangat mempengaruhi pembentukan struktur ide yang Jepang miliki dalam memandang peranannya terhadap komunitas global. Jepang menjadikan perdagangan bebas sebagai bentuk pemenuhan kemakmuran negara dan ajang menunjukkan peranan globalnya. Struktur ide perdagangan bebas Jepang juga didukung oleh faktor internal dan eksternal mengenai paham globalisasi. Era globalisasi spontan mendesak tiap negara untuk jauh membuka diri terhadap kerja sama multilateral yang mampu membentuk rezim saling membutuhkan, sehingga mewujudkan kesejahteraan kolektif. Begitu juga halnya dengan opini publik yang berkembang dalam masyarakat Jepang untuk membentuk integrasi dalam memperlihatkan dan mempromosikan nilai-nilai regional yang dianggap baik untuk kemudian diterapkan dalam kebudayaan universal. Globalisasi bukanlah bentuk hegemoni oleh satu negara, namun merupakan rezim untuk saling berbagi ilmu dan inovasi dalam menjalankan tanggung jawabnya menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

Struktur ide perdagangan bebas inilah yang kemudian mempengaruhi pembentukan identitas baru Jepang yang dari sejak periode Restorasi Meiji memiliki kedekatan yang erat dengan Amerika Serikat, kemudian berubah menjadi aktif sebagai *leader* dalam kemitraan kawasan Asia Pasifik. Dalam peranannya sebagai *leader* dalam pembentukan perjanjian CPTPP, Jepang mampu memperlihatkan pada dunia tentang keberaniannya menjalankan nasionalisme ekonomi, tanpa pertolongan dari Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Jepang juga mengajak berbagai negara untuk bergabung dengan keanggotaan CPTPP sebagai bentuk penolakannya terhadap kebijakan proteksionisme Amerika Serikat yang dianggap tidak relevan dengan era globalisasi saat ini.

Tentu dalam pembentukan identitas yang baru, Jepang juga memiliki beberapa kepentingan. Salah satunya adalah kepentingan politik berupa peningkatan peran global dalam kawasan Asia Pasifik. Jepang selama ini selalu menjadi negara bayangan bagi Amerika Serikat dalam menentukan politik luar negerinya. Namun setelah keluarnya Amerika Serikat dari TPP, Jepang mendapatkan panggung sendiri untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa ia merupakan negara normal yang mampu menentukan kebijakan luar negerinya berdasarkan kepentingan nasional. Melalui perekonstruksian TPP, Jepang ingin membuktikan bahwa globalisasi adalah era untuk mengadakan kerja sama multilateral dan bukan sebuah upaya hegemoni oleh satu kekuatan *superpower*. Jepang ingin mendapatkan pengakuan dari dunia bahwa ia juga bisa menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan melalui kebutuhan integrasi dari seluruh negara.

Selain untuk memperluas jangkauan kebijakan politiknya dalam pergaulan internasional, Jepang juga menjadikan CPTPP sebagai kemitraan perdagangan bebas multilateral yang mampu meningkatkan eksportnya. Hal ini diupayakan Jepang mengingat dari data perdagangan yang dilakukan Jepang terutama terhadap negara-negara anggota CPTPP tidaklah seimbang, dimana jumlah impor terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah ekspor. Sehingga pembentukan pasar bebas yang telah mengalami pembaharuan regulasi yang

lebih ramah terhadap ketenagakerjaan lokal ini mampu mengakomodasi berbagai permasalahan ekonomi negara maupun masyarakat internasional.